

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI BARRU

Jl. Sultan Hasanuddin. No.9 Kel,Sumpang Binangae, Kec.Barru, Kab.Barru Email. Kejari.barru@gmail.com

# **KEPUTUSAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARRU NOMOR: KEP-46A/P.4.21/Cr.3/01/2024

# **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BARRU TAHUN 2023

# KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARRU

# Menimbang : a.

- Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Barru dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masing-masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Barru, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Barru Tahun 2023.

#### Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARRU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BARRU TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barru Tahun 2023.

KEDUA: Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barru Tahun
2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri
dari:

- 1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Barru;
- Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Barru;
- 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Barru Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Barru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru pada tanggal 17 Januari 2024

EPALA KRIAKSAAN NEGERI BARRU

PATPIQ DIALAL, S.H., M.H

JAKSA MADYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI BARRU
NOMOR: KEP-46A/P.4.21/Cr.3/01/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI BARRU TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARRU	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	ANGGOTA
3	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KIAKSAAN NEGERI BARRU

10 DJALAL, S.H., M.H JAKSA MADYA